

**PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS**



KECAMATAN SIAK KECIL

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIAK KECIL 2021-2026



RENSTRA

LUBUK MUDA 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Dengan se izin Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Kecamatan Siak Kecil sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban menyusun Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sebagai perangkat daerah kecamatan masuk dalam urusan kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan publik sebagai fokus utamanya.

Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja dan penyusunan anggaran selama masa priode renstra. Pengukuran capaian renstra akan terus direview untuk menilai dan menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama periode tersebut. Setiap perubahan akan diselaraskan kembali agar capaian kinerja bisa maksimal dan realistis.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, setiap kebijakan pembangunan dengan diikuti penyusunan program dan kegiatan akan bersifat dinamis, untuk itu diharapkan kepada semua pihak peran aktif untuk memberikan masukan dan saran penyempurnaan penyusunan dan pencapaian kinerja perangkat daerah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Lubuk Muda, Juni 2021

**CAMAT SIAK KECIL**
M. FADLUL WAJDI, SSTP.M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 198209222001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar belakang.....	1
1.2.Landasan hukum	2
1.3.Maksud dan tujuan.....	3
1.4.Sistematika penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	6
2.2.2. Sarana dan Prasarana	9
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan.....	10
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	13
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat daerah.....	18
3.2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	21
3.3.Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PNS MENURUT JENIS KELAMIN 1	7
TABEL 2.2 PNS MENURUT GOLONGAN 1	7
TABEL 2.3 PNS MENURUT ESELON 1	7
TABEL 2.4 PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 1	8
TABEL 2.5 PNS MENURUT USIA 1	8
TABEL 2.6 DAFTAR ASET YANG DIMILIKI 1	9
TABEL 2.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 1	12
TABEL 2.8 TARGET DAN REALISASI BTL 1	13
TABEL 2.9 TARGET DAN REALISASI BL 1	14
TABEL 2.10 ANGGARAN DAN REALISASI 1	15
TABEL 3.1 ASPEK DAN PERMASALAHAN 1	20
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN 1	25
TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN 1	27
TABEL 6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN 1	37
TABEL 6.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN 1	52
TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA 1	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN 1.....	6
GAMBAR 2.2 ANALISA SWOT 1	17
GAMBAR 3.1 KERANGKA PERMASALAHAN 1.....	19
GAMBAR 6.1 ARSITEKTUR KINERJA 1	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pelayanan yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena pelayanan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur **outcome** (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan administrasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2)

penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Kecamatan Siak Kecil harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra karena melalui proyeksi kepuasan atas pelayanan dan kinerja tersebut tertuang tantangan pelayanan Kecamatan dalam mendorong kepuasan masyarakat. Renstra juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis);

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siak Kecil dalam pelayanan publik;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Siak Kecil.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan kewilayahan termasuk pelayanan publik. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 tahun 2016, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pemerintahan khususnya pelayanan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan perbub.
- c) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
- d) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
- e) Pelaksanaan urusan pemerinatahan yang tidak dilaksanakan unit kerja kabupaten yang ada di kecamatan.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

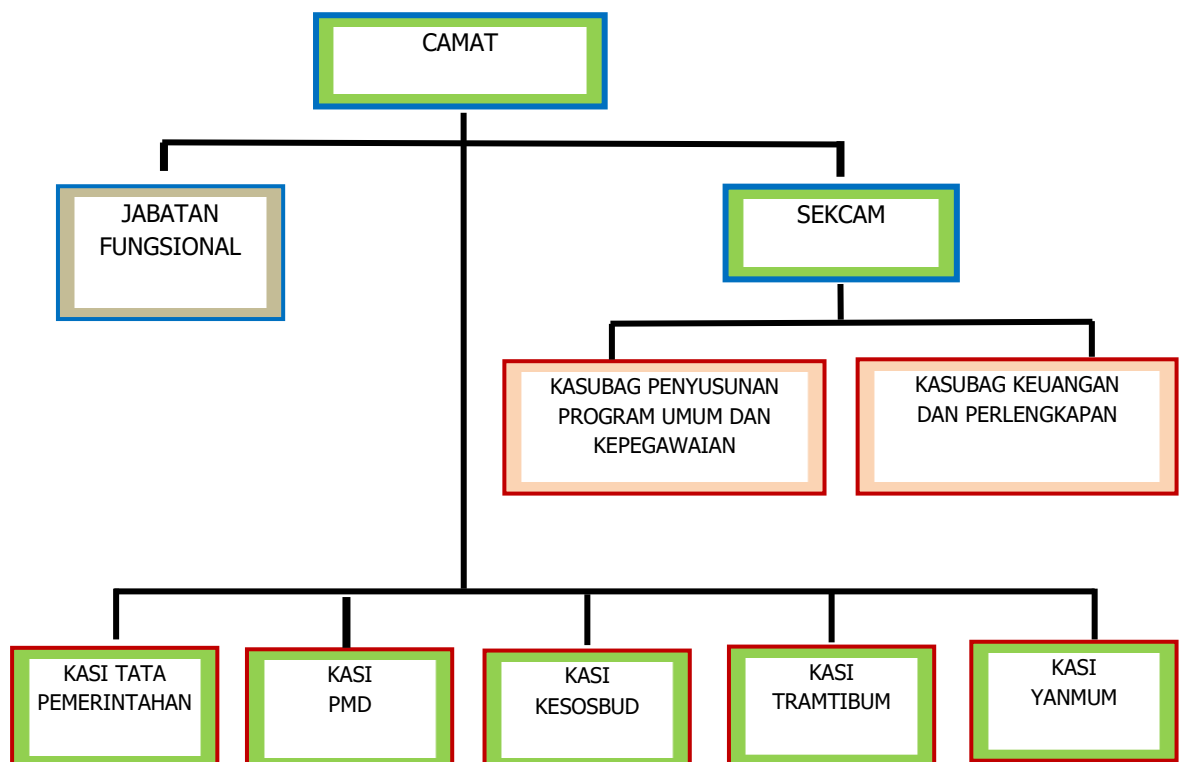
- a) Perizinan
- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitas
- g) Penetapan

- h) Penyelenggaraan dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan kewenangan kecamatan sebagaimana dimaksud mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada kecamatan dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi.

Struktur organisasi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan 1



Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah 28 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 33 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 PNS menurut jenis kelamin 1

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT	4	4	8
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	6	0	6
3.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2	0	2
4.	SEKSI TRAMTIBUM	10	1	11
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	0	0	0
6.	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	1	0
TOTAL		22	6	28

Sumber: Sekretariat Kecamatan Siak Kecil, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 28 orang PNS dilingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, 22 orang (79,57%) adalah laki-laki dan 6 orang (21,43%) adalah perempuan.

Tabel 2.2 PNS menurut golongan 1

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	0	4	3	1
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	0	5	1	0
3.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	1	1	0
4.	SEKSI TRAMTIBUM	0	11	0	0
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	0	0	0	0
6.	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	0	1	0
TOTAL		0	21	6	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Siak Kecil, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II, yaitu mencapai 21 orang atau 75,00%, sedangkan Golongan III hanya sejumlah 6 orang atau 21,43%, sedangkan golongan IV hanya 1 orang atau 3,57 %. Kondisi ini kurang ideal dalam hal manajerial. Sedangkan jumlah menurut eselon atau jabatan struktural sebagai berikut:

Tabel 2.3 PNS Menurut Eselon 1

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	0	1	2
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	0	0	1
3.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	0	1
4.	SEKSI TRAMTIBUM	0	0	0
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	0	0	0
6.	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	0	1
TOTAL		0	1	5

Sumber: Sekretariat Kecamatan Siak Kecil, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa terdapat 6 jabatan terisi di lingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Namun ada beberapa eselon yang kosong sehingga beban kerja golongan eselon III menjadi bertambah. Dari jumlah tersebut ada 3 jabatan pada Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang tidak terisi.

Tabel 2.4 PNS Menurut tingkat pendidikan ¹

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	SEKRETARIAT	1	3	1	3	0	8
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	1	0	0	5	0	6
3.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	1	0	1	0	2
4.	SEKSI TRAMTIBUM	0	0	0	11	0	11
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	0	0	0	0	0	0
6.	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	0	0	1	0	1
TOTAL		2	4	1	21	0	28

Sumber: Sekretariat Kecamatan Siak Kecil, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sejumlah 21 orang atau sebesar 75,00%, sedangkan S1 sebanyak 4 orang 14,29 %. Tingkat pendidikan S2 hanya 2 orang atau 7,14 % sama dengan D3. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional.

Tabel 2.5 PNS Menurut usia ¹

NO	UNIT KERJA	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	SEKRETARIAT	0	0	1	5	2	0	0	8
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	0	0	0	0	4	1	1	6
3.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	1	0	0	0	0	0	1
4.	SEKSI TRAMTIBUM	0	0	0	4	4	3	1	12
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SEKSI PELAYANAN UMUM	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL		0	1	1	9	10	4	3	28

Sumber: Sekretariat Kecamatan Siak Kecil, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis didominasi pegawai usia produktif yaitu 41-45 sejumlah 10 orang atau

sebesar 35,71%, sedangkan usia di atas 50 tahun dan diperkirakan pensiun dalam 5 tahun mendatang hanya 1 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.6 Daftar aset yang dimiliki ¹

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	3	3	-	-	
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	847	420	23	404	
3	Alat Angkutan	17	10	1	6	
4	Bangunan	69	69	-	-	
5	Pagar Permanen	2	2	-	-	
6	Jalan Desa	85	85	-	-	
7	Jembatan pada Jalan Desa	8	8	-	-	
8	Alat Praga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA dasar lainnya	10	10	-	-	
9	Rumah Negara	8	8			
10	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	21	21	-	-	
11	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	7	-	-	7	
12	Ilmu Pengetahuan Umum	22	22	-	-	
13	Ilmu Pengetahuan Politik	2	2	-	-	
14	Hukum	22	22	-	-	
15	Karya Seni lain-lainnya	4	4	-	-	
TOTAL		1.127	686	24	417	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Siak Kecil, Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.127 aset di lingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, terdapat 686 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 60,87%. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 24 atau sebesar 2,13%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 417 dengan persentase 37%. Komposisi data tersebut

dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

Di samping keberadaan aset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang penyelenggaraan pemerinatah urusan kewilayahan termasuk pelayanan publik, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun2016-2021) antara lain adalah sebagai berikut :

Tahun 2016

1. Pembentukan unit Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) berupa loket pelayanan dan petugas pelayanan. Layanan ini adalah kemudahan masyarakat untuk mendapat layanan perizinan dan non perizinan hanya terpusat pada satu pintu.

Tahun 2017

1. Peningkatan kelembagaan PATEN. Dalam rangka meningkatkan pelayanan diadakan tenaga pelayanan khusus dengan kompetensinya masing- masing.

Tahun 2018

1. Peningkatan sarana dan prasarana PATEN berupa peralatan dan perlengkapan pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan yang memuaskan.

Tahun 2019

1. Penguatan unit PATEN melalui teknologi informasi. Mulai dilakukan pelayanan menggunakan teknologi dalam pelayanan walaupun belum maksimal.

Tahun 2020

1. Pembenahan administrasi. Hal ini terkait dengan penyesuaian SOP dan standar pelayanan dengan menyesuaikan terhadap regulasi dan kewenangan yang berlaku.

Di samping hal-hal strategis tersebut di atas, secara berkelanjutan Kecamatan juga melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola administrasi pelayanan, SDM operator sistem dan operator data serta SDM pengelolaan pelayanan. Beberapa layanan unggulan (Layanan Sistem Manajemen Mutu) yang dilakukan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAYANAN. Merupakan aplikasi administrasi secara *online* yang terhubung untuk memudahkan distribusi surat menyurat serta kearsipannya. Serta untuk memudahkan dalam memproses surat tanpa meminta pengesahan atasan secara fisik sehingga memangkas waktu penerbitan dokumen.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Pencapaian kinerja pelayanan 1
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	Skor	-	-	-	80	81	82	83	84	80.36	80.95	84.3	86.33	86.69	100 %	100 %	103 %	104 %	103 %
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	Persentase	-	-	-	80%	81%	88%	90%	95%	100%	99%	112%	76.47%	100%	125 %	122 %	127 %	85 %	105 %
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Persentase	-	-	-	84%	86%	88%	86%	88%	100%	100%	100%	81.25%	33.33%	119 %	116 %	114 %	94 %	38 %

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Siak Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp **15,119,978,511.00** (lima belas milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas ribu rupiah) atau sebesar 92,56% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp **16,334,793,205.00** (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Target dan Realisasi BTL ¹
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	3,415,894,972.00	3,062,276,057.00	89.65%
2	2017	3,087,640,623.00	2,731,773,565.00	88.47%
3	2018	2,925,311,168.00	2,807,624,262.00	95.98%
4	2019	3,595,225,939.00	3,396,296,617.00	94.47%
5	2020	3,310,720,503.00	3,122,008,010.00	94.30%
Jumlah		16,334,793,205.00	15,119,978,511.00	92.56%

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat "sangat tinggi". Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp **16,334,793,205.00** (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).

b) Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp **20,184,724,585.00** (dua puluh milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp **20,844,369,250.00** (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,84%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Target dan Realisasi BL 1
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	6,781,744,400.00	6,742,442,347.00	99.42%
2	2017	4,016,983,200.00	3,561,967,038.00	88.67%
3	2018	3,791,099,700.00	3,740,508,300.00	98.67%
4	2019	3,605,927,600.00	3,581,629,500.00	99.33%
5	2020	2,648,614,350.00	2,558,177,400.00	96.59%
Jumlah		20,844,369,250.00	20,184,724,585.00	96.84%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Dan cukup optimal dengan realisasi mencapai 96.84%

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp 7.060.940.619.20 (tujuh milyar enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan belas koma dua puluh rupiah) atau sejumlah Rp 35.304.703.096,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Kecamatan Siak Kecil Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi 1
Pendanaan Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran tahun ke- Rp.000					Realisasi Anggaran tahun ke- Rp.000					Rasio antara anggaran dan realisasi anggaran tahun tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	25.060	128.740	59.602	71.811	165.474	24.900	127.453	58.250	70.875	163.850	99.36	99.00	97.73	98.70	99.02	102.19	102.08
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	226.853	582.016	3.452.362	3.754.324	3.781.058	220.742	573.691	3.413.375	3.365.659	3.588.358	97.31	98.57	98.88	97.64	94.90	131.84	132.04
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	17.325	21.311	27.609	22.800	24.200	17.200	20.300	27.300	22.400	23.710	99.28	95.26	98.88	98.25	97.98	8.26	8.08

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016 s/d 2020. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Kecamatan Siak Kecil antara lain adalah :

1. Rasio antara anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun presentase pada Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,36% ditahun pertama menjadi 99,02% ditahun terakhir (kelima) dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 99,89%.
2. Rasio antara anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun presentase pada Presentase Kelurahan / Desa Dengan Kinerja Baik sebesar 97,31% ditahun pertama menjadi 94,90% ditahun terakhir (kelima) dan rata-rata pertumbuhan realisasinya mengalami kenaikan 1% dari anggaran.
3. Rasio antara anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun presentase pada Presentase Penurunan Gangguan KAMTIBMAS sebesar 99,28% ditahun pertama menjadi 97,98% ditahun terakhir (kelima) dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 97,82%.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Siak Kecil selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan kedepan diantaranya:

1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai. Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu.
2. Kondisi geografis Aksesibilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan.
4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.

2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan.
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan analisa SWOT, maka kita dapat tentukan alternatif strategi yang akan dilakukan Kecamatan Siak Kecil yaitu:

Gambar 2.2 Analisa SWOT 1

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya 2. Penetapan Kecamatan sebagai lokasi prioritas dan kawasan tertentu. 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai 2. Kondisi geografis 3. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi dipayungi regulasi yang jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Publik yang prima. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Koordinasi antar instansi dalam pemenuhan kepuasan masyarakat; 2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan 3. Inovasi pelayanan.
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan 	<p>Alternatif kelemahan (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM. 2. Integrasi sistem onformasi pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya evaluasi tentang pelaksanaan pelayanan publik. 2. Peningkatan Kualitas SDM pelayanan dengan program-program pelatihan dan sertifikasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah "**Pelayanan Publik yang belum Prima**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan publik belum optimal.

Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan

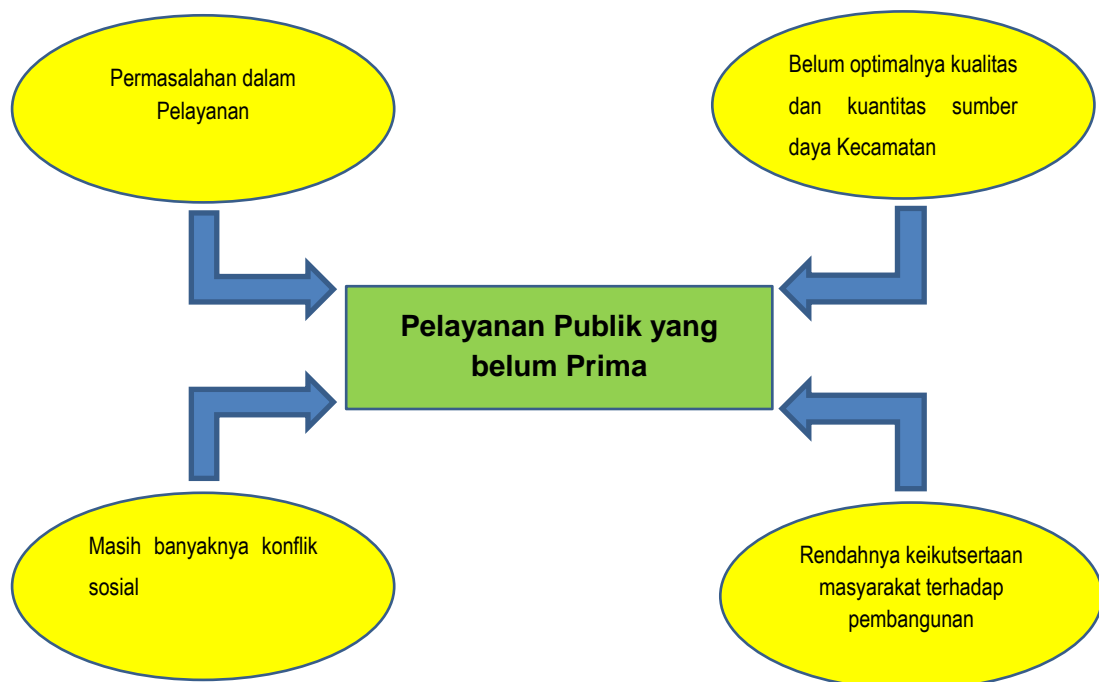
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya Kecamatan

- a. Masih rendahnya kompetensi aparatur.

- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- 3. Masih banyaknya konflik sosial
 - a. Masih adanya konflik masyarakat
 - b. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa
 - c. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan
 - d. Masih adanya konflik batas administrasi
- 4. Rendahnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan.
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Siak Kecil lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya.

Gambar 3.1 Kerangka Permasalahan 1



Salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat adalah memberikan pelayanan (*customer service*) yang baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan.. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Di samping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun kebijakan maupun memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan. Kesan ketidakramahan petugas dalam melayani masyarakat harus dihilangkan. Kesan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa dilayani bukan melayani.

Konflik social yang masih terjadi juga menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan. Jika kondisi kurang kondusif tentunya dapat menghambat prosedur yang telah ditetapkan selanjutnya berpengaruh terhadap pelaksanaan kualitas pelayanan yang diberikan.

Tingkat partisipasi masyarakat dan desa terhadap pembangunan sangat berkorelasi dalam peningkatan kinerja perangkat daerah terutama kecamatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan langsung. Jika keaktifan masyarakat dan desa minim maka kinerja pemerintah tentunya tidak akan dapat maksimal.

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami petugas sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, misalnya :

- a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
- c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
- d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas
- e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
- f. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif
- g. Keterbatasan sumber-sumber daya pendukung
- i. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
- k. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan maksimal
- l. Lemahnya integritas aparatur

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Kecamatan Siak Kecil sebagai berikut.

Tabel 3.1 Aspek dan Permasalahan ¹

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya penilaian pelayanan	Permasalahan dalam pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan. • Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan. • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
Kompetensi SDM	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kompetensi aparat • Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai • Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal. • Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
Konflik sosial masih ada	Masih banyaknya konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya Masih adanya konflik batas administrasi
Pemberdayaan tidak maksimal	Rendahnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Siak Kecil adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan indikasi tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siak Kecil untuk meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada kecamatan Siak Kecil dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparat pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Bermarwah merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa.

Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siak Kecil yaitu pada Misi II, yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode

perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara mencakup reformasi dibidang pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, tata busana serta tutur kata dalam berkomunikasi.

2. Peningkatan Sumberdaya perangkat daerah

Peningkatan kompetensi aparatur serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapat perhatian yang serius.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain adalah:

a. Membentuk aparat yang profesional, meliputi :

- Integritas, yaitu ukuran kualitas moral aparat pajak yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
- Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan petugas pajak terhadap setiap ketentuan yang berlaku;
- Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

3. Inovasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Bapenda harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan masyarakat. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat juga menjadi tuntutan masyarakat dewasa ini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Siak Kecil yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Siak Kecil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada defenisi dan tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran 1
Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, pengelolaan keuangan	Nilai Sakip		B	B	B	A	A
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		87	87	88	90	91
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS		37 %	40 %	50 %	65 %	80 %
		Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik		41,18 %	52,94 %	70,59 %	88,24 %	100 %

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan 1
Arah kebijakan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

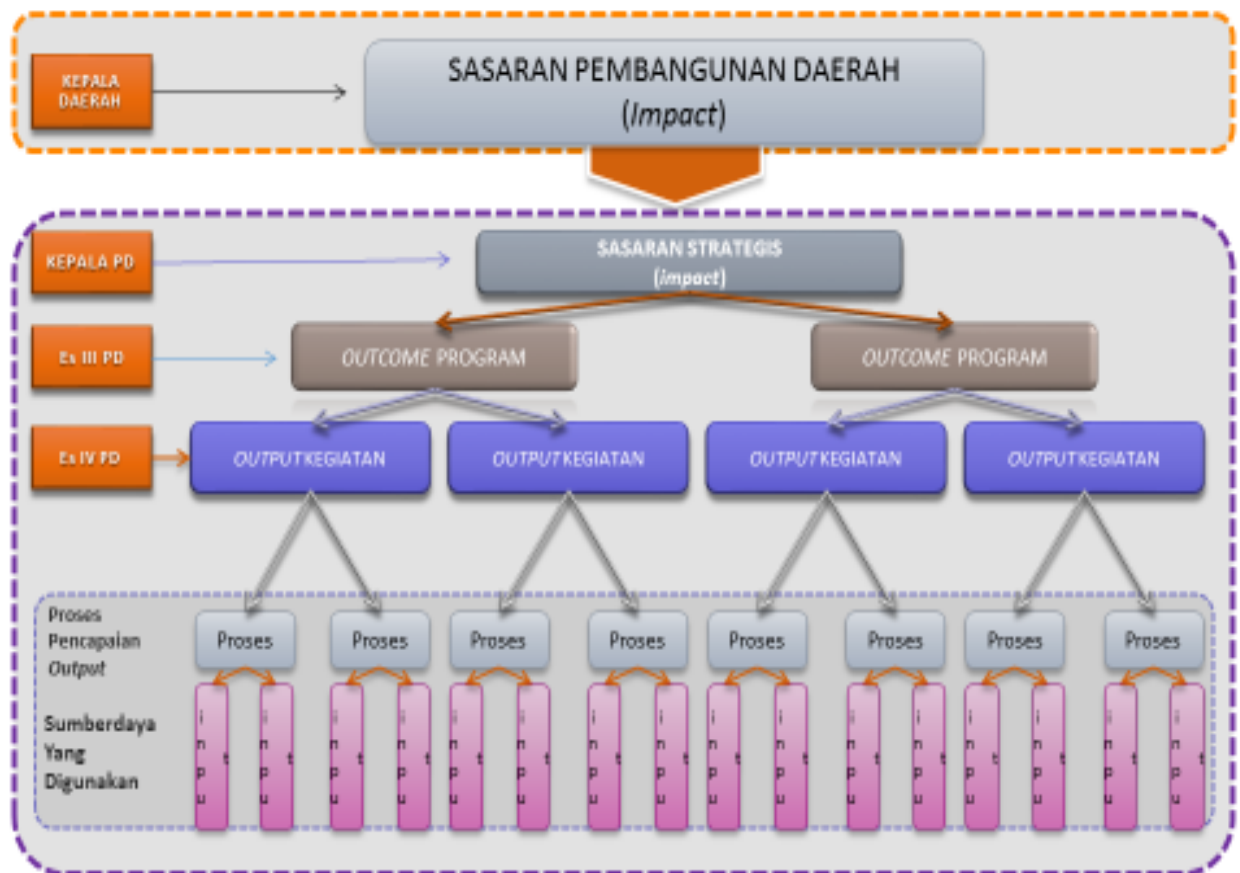
Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera		
Misi ke-II	Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, pengelolaan keuangan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan	Peningkatan peran bagian perencanaan dan keuangan
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
			Menyelenggarakan standard pelayanan public yang smart
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Penguatan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum
			Mengkoordinasikan penenggakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Penguatan kebijakan pembinaan masyarakat dan desa atau kelurahan	Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pemerintahan desa atau kelurahan	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja 1

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (Camat). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab Sekretaris (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis direncanakan pada periode tahun 2021-2026 berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perencanaan dalam penganggaran dan evaluasi kinerja.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang akan disusun dan ditetapkan

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen RKA – SKPD.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dokumen gaji dan tunjangan ASN tahun berjalan.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen laporan akuntansi yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen bahan Tanggapan Pemeriksaan, dokumen penyelesaian tindak lanjut dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset.

3. Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik daerah secara berkesinambungan dan tepat guna.

a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai bahan untuk perencanaan dan penganggaran barang di SKPD.

b. Pengamanan barang milik daerah SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir jasapetugas pengamanan aset.

c. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen laporan barang milik daerah SKPD.

d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penatausahaan barang milik daerah SKPD.

4. Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian yang update dan valid.

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan senam.

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pelaporan data kepegawaian secara berkala.

d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan kompetensi melalui bimtek dan diklat.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah .

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan belanja komponen listrik yang rutin.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peralatan rumah tangga dinas jabatan.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan penyediaan makanan dan minuman.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan barang cetakan dan publikasi lainnya.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan bahan bacaan.

g. Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan bahan material secara terbatas.

h. Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelayanan tamu resmi.

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan perjalanan dinas biasa dan dalam kota.

j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah.

k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengelolaan website dan aplikasi lainnya serta operatornya.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan kendaraan operasional dinas.

b. Pengadaan Mebel.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan mebel gedung kantor dan rumah dinas.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin pendukung kerja.

d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan aset tetap berupa buku, foto dan sejenisnya.

e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan gedung baru seperti musholla dan sebagainya.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas

g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan rumah dinas

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelayanan surat umum dan tenaga administrasi.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan jasa atas listrik dan air serta komunikasi.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pendukung mobilitas kepala perangkat daerah seperti supir.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan kendaraan jabatan berupa servis dan perizinannya.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional berupa servis dan perizinannya

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan peralatan yang rusak ringan.

d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan sistem aplikasi .

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas.

- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

- 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pembinaan pemerintahan desa.

- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan/ PATEN.

- 3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pemeliharaan fasilitas umum.

- 4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

- 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pendukung pelaksanaan musrenbang di desa dalam wilayah kecamatan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kecamatan.

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan penegakkan peraturan dengan Perangkat Daerah.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a. Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam penyusunan perdes dan perkades.

b. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan administrasi pada tata pemerintahan desa.

c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

d. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan pelaksanaan tugas kades dan perangkat desa.

e. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam melaksanakan pemilihan kades.

f. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

g. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

h. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

i. Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

j. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

k. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

l. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

m. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Rincian program dan kegiatan Renstra Kecamatan Siak Kecil kabupaten bengkalis Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan 1
Indikator Kinerja dan Unit Kerja Penanggung Jawab Renstra Kecamatan Siak Kecil Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satu indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab						
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp							
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan	Nilai SAKIP								B		B		B		A		A									
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTAS E PEMENUHAN LAYANAN ADM PERKANTORAN	Persentase										100	7,501,500,000	100	7,708,100,000	100	7,654,260,000	100	7,793,900,000	100	8,063,660,000	100	38,721,420,000	Kecamatan Siak Kecil
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan diselesaikan tepat waktu dan valid	Persentase										100	111,000,000	100	112,500,000	100	114,150,000	100	112,500,000	100	136,150,000	100	586,300,000	Subbag Perenc, umum dan kepegawaian
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan diadakan	Dokumen	2									2	43,500,000	2	43,500,000	2	43,500,000	2	43,500,000	2	65,500,000	10	239,500,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran diadakan	Dokumen	2									2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	3	25,000,000	11	125,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan diadakan	Dokumen	4				4	27,500,000	4	27,500,000	4	27,500,000	4	27,500,000	4	27,500,000	20	137,500,000						

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satu indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
										Tar get	R p	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi diadakan	Doku men	3			3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	16,500,000	3	18,150,000	15	84,300,000	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm gaji dan dokumen pelaporan diselesaikan tepat waktu dan valid					100	3,742,000,000	100	3,742,000,000	100	3,744,000,000	100	3,746,000,000	100	3,746,000,000	100	18,720,000,000	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dalam 1 Tahun	Bula n	14			14	3,700,000,000	14	3,700,000,000	14	3,700,000,000	14	3,700,000,000	14	3,700,000,000	70	18,500,000,000	
							Jumlah penyediaan TPP dalam 1 Tahun	Bula n	12			12		12	12	12	12	12	12	12	12	60	-	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi di SKPD	Lapo ran	0			12	14,000,000	12	14,000,000	12	15,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	60	77,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan di SKPD	Lapo ran	1			1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP	Doku men	0			1	13,000,000	1	13,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	5	68,000,000	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keamanan dan dokumen aset dilaksanakan	Pers entase				100	215,000,000	100	216,600,000	100	219,860,000	100	220,000,000	100	221,760,000	100	1,093,200,000	Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan asset	Doku men	0			2	15,000,000	2	15,000,000	2	16,500,000	2	16,500,000	2	16,500,000	10	79,500,000	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa tenaga keamanan di adakan.	Oran g/ Bula n	0			96	165,000,000	96	165,000,000	96	165,000,000	96	165,000,000	96	165,000,000	480	825,000,000	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan asset	Doku men	0			1	16,000,000	1	17,600,000	1	19,360,000	1	17,600,000	1	19,360,000	5	89,920,000	
						Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penata usahaan aset	Doku men	0			12	19,000,000	12	19,000,000	12	19,000,000	12	20,900,000	12	20,900,000	60	98,800,000	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin PNS	Pers entase				100	172,500,000	100	172,500,000	100	161,500,000	100	161,500,000	100	161,500,000	100	829,500,000	Subbag Perenc, umum dan kepega waian
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah instruktur senam diadakan	Oran g/ Bula n	0			12	7,500,000	12	7,500,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	60	45,000,000	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan	Pasa ng	0			35	50,000,000	35	50,000,000	35	35,000,000	35	35,000,000	35	35,000,000	175	205,000,000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan penata usahaan aset	Doku men	0			12	15,000,000	12	15,000,000	12	16,500,000	12	16,500,000	12	16,500,000	60	79,500,000	
						Bimbingan Teknis	Jumlah ASN Teknis,	Oran g/	6			10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	50	500,00	

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab	
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
										Tar get	R p	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
						Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Workshop, Seminar dan Diklat	kali					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan adminstrasi umum	Persentase				100	783,000,000	100	791,500,000	100	825,750,000	100	824,900,000	100	829,250,000	100	4,054,400,000		Subbag Perenc, umum dan kepega waian
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik diadakan	Buah	30			35	35,000,000	35	38,500,000	35	42,350,000	35	38,500,000	35	42,350,000	175	196,700,000		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Buah	50			50	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000	250	350,000,000		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah diadakan	Buah	0			12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	38,000,000	12	38,500,000	60	181,500,000		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan diadakan	Porsi	0			3,500	55,000,000	3,500	55,000,000	3,500	60,500,000	3,500	60,500,000	3,500	60,500,000	17,500	291,500,000		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan publikasi informasi diadakan	Jenis	0			10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	50	500,000,000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media dilakukan kerjasama	Penebit	16			16	24,000,000	16	24,000,000	16	26,400,000	16	26,400,000	16	26,400,000	80	127,200,000		
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material	Buah	0			5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	25	125,000,000		

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab	
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
										T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							diadakan																		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu dapat difasilitasi	Kali	0			10	25,000,000	10	25,000,000	10	27,500,000	10	27,500,000	10	27,500,000	50	132,500,000		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	Orang/kali	210			240	320,000,000	240	320,000,000	240	340,000,000	240	340,000,000	240	340,000,000	1,200	1,660,000,000		
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah tenaga arsip diadakan	Orang/kali	0			12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	60	120,000,000		
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah tenaga pengelola website	Orang/Bulan	24			24	70,000,000	24	75,000,000	24	75,000,000	24	75,000,000	24	75,000,000	120	370,000,000		
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Persentase	70			80	1,255,000,000	85	1,450,000,000	90	1,344,000,000	95	1,484,000,000	100	1,724,000,000	100	7,257,000,000	Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas diadakan	Buah	0			1	50,000,000	-	-	1	50,000,000	-	-	1	50,000,000	3	150,000,000		
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor diadakan	Buah	0			10	35,000,000	-	-	10	40,000,000	-	-	10	40,000,000	30	115,000,000		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor diadakan	Buah	0			15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	75	500,000,000		
						Pengadaan	Jumlah aset	Buah	0																

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
										Tar get	R p	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						Aset Tetap Lainnya	tetap diadakan					10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	50	50,000,000	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung dibangun.	Buah	0			3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	15	2,500,000,000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung dibangun.	Buah	0			-	-	2	380,000,000	-	-	2	380,000,000	2	380,000,000	6	1,140,000,000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung dibangun.	Buah	0			1	100,000,000	-	-	2	150,000,000	-	-	2	150,000,000	5	400,000,000	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan kecamatan	Persentase	100			100	230,000,000	100	230,000,000	100	247,000,000	100	247,000,000	100	247,000,000	100	1,201,000,000	Subbag Perenc, umum dan kepegawaian
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa administrasi diadakan	Orang/Bulan	12			12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	12	37,000,000	60	185,000,000	
							Jumlah surat terkirim	Surat	195			200		200		200		200		200		200	1,000	-
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Listrik, air dan internet	Bulan	12			12	170,000,000	12	170,000,000	12	187,000,000	12	187,000,000	12	187,000,000	60	901,000,000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa soipr diadakan	Orang/Bulan	12			12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	60	115,000,000	

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab	
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	25	26		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dapat dilakukan pemeliharaan	Persentase	90			100	993,000,000	100	993,000,000	100	998,000,000	100	998,000,000	100	998,000,000	100	4,980,000,000		Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dilakukan pemeliharaan dan perizinannya.	Unit	2			2	130,000,000	2	130,000,000	2	135,000,000	2	135,000,000	2	135,000,000	10	665,000,000		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dilakukan pemeliharaan dan perizinannya.	Unit	1			6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	30	250,000,000		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin dinas dilakukan pemeliharaan	Unit	10			15	38,000,000	15	38,000,000	15	38,000,000	15	38,000,000	15	38,000,000	75	190,000,000		
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud dilakukan pemeliharaan	Unit	1			1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000		
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dilakukan	Unit	0			1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000		

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satu indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
						Lainnya	rehabilitasi																			
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dilakukan pemeliharaan	Unit	0			2	550,000,000	2	550,000,000	2	550,000,000	2	550,000,000	2	550,000,000	10	2,750,000,000			
							Jumlah tenaga kebersihan diadakan	Orang/ Bulan	132			144		144		144		144		144		144	720	-		
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM				87		88		89		90		91		91					
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	IKM	86			87	915,000,000	88	920,000,000	89	920,000,000	90	925,000,000	91	925,000,000	91			Kecamatan Siak Kecil	
						Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi pemerintahan	Persentase	90			100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	3,125,000,000	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	1			1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000	
						Peningkatan Efektifitas	Jumlah kegiatan	Laporan	0			14	600,00	14	600,00	14	600,00	14	600,00	14	600,00	14	600,00	70	3,000,000	

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab	
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
										Tar get	R p	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
						Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	pembinaan pemerintahan						0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		00,000		
						Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase peningkatan efektifitas pelayanan	Persentase	85			92	125,000,000	94	130,000,000	96	130,000,000	98	135,000,000	100	135,000,000	100	655,000,000		Seksi pelayanan umum
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen/surat yang diterbitkan	Dokumen/surat	650			700	125,000,000	700	130,000,000	700	130,000,000	700	135,000,000	700	135,000,000	3,500	655,000,000		
						Jumlah petugas PATEN	Jumlah petugas PATEN	Orang/Bulan	72			72		72		72		72		72		72	360		
						Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase prasarana dan sarana umum terpeliharaan	Persentase	50			60	15,000,000	70	15,000,000	80	15,000,000	90	15,000,000	100	15,000,000	100	75,000,000		Seksi pelayanan umum
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi dilaksanakan	Laporan	0			2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10	75,000,000		

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
										Tar get	R p	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Persentase	0			100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	500	750,000,000	Seksi pelayanan umum
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan sesuai pelimpahan kewenangan	Laporan	0			3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	15	750,000,000	
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik							41.18%		52.94%		70.59%		88.24%		100%		100%		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	IKM	86			87	960,000,000	88	960,000,000	89	960,000,000	90	960,000,000	91	960,000,000	91		Kecamatan Siak Kecil
						Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi pemberdayaan	Persentase	0			100	925,000,000	100	925,000,000	100	925,000,000	100	925,000,000	100	925,000,000	500	4,625,000,000	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah unsur yang mengikuti perencanaan pembangunan	Unsur	0			6	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	8	25,000,000	8	25,000,000	36	125,000,000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Laporan	0			5	900,000,000	5	900,000,000	5	900,000,000	5	900,000,000	5	900,000,000	25	4,500,000,000	

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satu indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab	
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
						Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n dilaksanakan																		
						Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan partisipasi desa	Persentase	0			100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	500	175,000,000		Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa
						Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	Laporan	0			4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	20	175,000,000		
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS							37%		40%		50%		65%		80%		80%			
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KAMTIBMAS	PERSENTASE				37	201,000,000	40	201,000,000	50	201,000,000	65	201,000,000	80	201,000,000		1,005,000,000		Kecamatan Siak Kecil
						Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan partisipasi desa	Persentase				80	175,000,000	82	175,000,000	84	175,000,000	86	175,000,000	88	175,000,000	420	875,000,000		Seksi Tramtibum
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah koordinasi dilaksanakan	Laporan	0			20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	100	175,000,000		

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab	
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
										Tar get	R p	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
						Wilayah Kecamatan																			
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dilaksanakan	Laporan	0			4	140,000,000	4	140,000,000	4	140,000,000	4	140,000,000	4	140,000,000	20	700,000,000		
						Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kejadian pelanggaran tramtibum	Persentase	0			40	26.000.000	50	26.000.000	60	26.000.000	70	26.000.000	80	26.000.000	300	130.000.000		Seksi Tramtibum
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pemantauan dan pembinaan yang dilaksanakan	Laporan	0			6	26,000,000	6	26,000,000	6	26,000,000	6	26,000,000	6	26,000,000	30	130,000,000		
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik							41.18%		52.94%		70.59%		88.24%		100%		100%			
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	IKM	86			87	650,000,000	88	650,000,000	89	650,000,000	90	650,000,000	91	650,000,000		3,250,000,000		Kecamatan Siak Kecil

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satu indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
										T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	1	1	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.	Kecamatan				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi pemerintahan umum	Persentase				80	650,000,000	80	650,000,000	80	650,000,000	80	650,000,000	80	650,000,000	400	3,250,000,000		Seksi Tata Pemerintahan	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimtek dilaksanakan	Kegiatan	0			3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000	
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah unsur masyarakat yang memeriahkan peringatan hari besar nasional	Unsur	0			15	300,000,000	15	300,000,000	15	300,000,000	15	300,000,000	15	300,000,000	15	300,000,000	75	1,500,000,000	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	25	750,000,000	
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik							41.18%		52.94%		70.59%		88.24%		100%		100%				
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA / KELURAHAN DENGAN KINERJA BAIK	PERSENTASE	41.18			52.94	300,000,000	52.94	365,000,000	70.59	300,000,000	88.24	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000		1,565,000,000	Kecamatan Siak Kecil
						Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase terlaksananya pengawasan	Persentase	0			100	300,000,000	100	365,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	500	1,565,000,000	Seksi Tata Pemerintahan

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Masyarakat yang Berkarakter.					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pemerintahan desa																		tahan	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	Laporan	0			1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	Laporan	0			1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	Laporan	0			1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	Laporan	0			2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	125,000,000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	Laporan	0			-	-	2	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	65,000,000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	15	225,000,000	

No	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Satuan indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2020)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		Unit penanggung jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
						Umum																				
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	125,000,000	
						Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	
						Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	15	225,000,000	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	125,000,000	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	125,000,000	
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemantauan dilaksanakan	Laporan	0			24	35,000,000	24	35,000,000	24	35,000,000	24	35,000,000	24	35,000,000	24	35,000,000	120	175,000,000	
						Jumlah							10,527,500,000		10,804,100,000		10,685,260,000		10,829,900,000		11,099,660,000		44,541,420,000			

Tabel 6.2 Program, kegiatan dan 1
Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan Renstra Kecamatan Siak Kecil 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				A			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADM PERKANTORAN	0	100	38,721,420,000	Kecamatan Siak Kecil	Kecamatan Siak Kecil
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan diselesaikan tepat waktu dan valid	0	100	586,300,000	Subbag Perenc, umum dan kepegawaian	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan diadakan	2	12	239,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran diadakan	2	13	125,000,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan diadakan	4	24	137,500,000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi diadakan	3	18	84,300,000		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm gaji dan dokumen pelaporan diselesaikan tepat waktu dan valid	0	100	18,720,000,000	Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dalam 1 Tahun	14	84	18,500,000,000		
		Jumlah penyediaan TPP dalam 1 Tahun		12	72				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi di SKPD	0	72	77,000,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan di SKPD	1	6	75,000,000		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP	0	6	68,000,000		
			Kegiatan Administrasi Barang	Persentase keamanan	0	100		Sub Bagian	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dan dokumen aset dilaksanakan			1,093,220,000	Keuangan dan perlengkapan	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan aset	0	12	79,500,000		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa tenaga keamanan di adakan.	0	576	825,000,000		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan aset	0	6	89,920,000		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penata usahaan aset	0	72	98,800,000		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin PNS	0	100	829,500,000	Subbag Perenc, umum dan kepegawaian	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah instruktur senam diadakan	0	72	45,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan	0	210	205,000,000		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan kepegawaian yang valid	0	20	79,500,000		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	6	60	500,000,000		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum	0	100	4,054,400,000	Subbag Perenc, umum dan kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik diadakan	30	210	196,700,000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	50	300	350,000,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah diadakan	0	72	181,500,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan di adakan	0	21000	291,500,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan publikasi informasi diadakan	0	60	500,000,000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media dilakukan kerjasama	16	96	127,200,000		
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ material diadakan	0	30	125,000,000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu dapat difasilitasi	0	60	132,500,000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan	210	1440	1,660,000,000		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah tenaga arsip diadakan	0	72	120,000,000		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah tenaga pengelola website	24	144	370,000,000		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	70	100	7,257,000,000	Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas diadakan	0	3	150,000,000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor diadakan	0	30	115,000,000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor diadakan	0	90	500,000,000		
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap diadakan	0	60	50,000,000		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung dibangun.	0	17	2,500,000,000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung dibangun.	0	7	1,140,000,000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung dibangun.	0	5	400,000,000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa	Persentase	100	100		Subbag	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan jasa penunjang urusan kecamatan			1,201,000,000	Perenc, umum dan kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa administrasi diadakan	12	72	185,000,000		
				Jumlah surat terkirim	195	1200			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Listrik, air dan internet	12	72	901,000,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa soipr diadakan	12	72	115,000,000		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dapat dilakukan pemeliharaan	90	100	4,980,000,000	Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendararaan dinas dilakukan pemeliharaan dan perizinannya.	2	12	665,000,000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendararaan dinas roda 4 dan roda 2 dilakukan pemeliharaan dan perizinannya.	1	36	250,000,000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin dinas dilakukan pemeliharaan	10	90	190,000,000		
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud dilakukan pemeliharaan	1	6	125,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dilakukan rehabilitasi	0	6	1,000,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dilakukan pemeliharaan	0	12	2,750,000,000		
				Jumlah tenaga kebersihan diadakan	132	864			
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM	86	91			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	86	91	-	Kecamatan Siak Kecil	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi pemerintahan	90	100	3,125,000,000	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1	6	125,000,000		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan pemerintahan	0	84	3,000,000,000		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase peningkatan efektifitas pelayanan	85	100	655,000,000	Seksi pelayanan umum	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen/ surat yang diterbitkan	650	4200	655,000,000		
				Jumlah petugas PATEN	72	432			
			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase prasarana dan sarana umum terpeliharaan	50	100	75,000,000	Seksi pelayanan umum	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi dilaksanakan	0	12	75,000,000		
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksanya kegiatan yang dilimpahkan	0	500	750,000,000	Seksi pelayanan umum	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan sesuai pelimpahan kewenangan	0	18	750,000,000		
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik		Persentase	29.41	100			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	86	91	-	Kecamatan Siak Kecil	
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koodinasi	0	500	4,625,000,000	Seksi Pemberdayaan masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				pemberdayaan				dan desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah unsur yang mengikuti perencanaan pembangunan	0	42	125,000,000			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan	0	30	4,500,000,000			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan partisipasi desa	0	500	175,000,000	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa		
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	0	24	175,000,000			
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS		PERSENTASE		80				
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN GANGGUAN KAMTIBMAS	0	0	1,005,000,000	Kecamatan Siak Kecil	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan partisipasi desa	0	420	875,000,000	Seksi Tramtibum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dilaksanakan	0	120	175,000,000			
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dilaksanakan	0	24	700,000,000			
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Frekuensi dilakukannya Operasi Pekat	0	0	130,000,000	Seksi Tramtibum		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pemantauan dan pembinaan yang dilaksanakan	0	36	130,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik		Persentase	29.41	100			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	86	0	3,250,000,000	Kecamatan Siak Kecil	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi pemerintahan umum	0	400	3,250,000,000	Seksi Tata Pemerintahan	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimtek dilaksanakan	0	18	1,000,000,000		
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah unsur masyarakat yang memeriahkan peringatan hari besar nasional	0	90	1,500,000,000		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemantauan dilaksanakan	0	30	750,000,000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA / KELURAHAN DENGAN KINERJA BAIK	41.18	0	1,565,000,000	Kecamatan Siak Kecil	
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya pengawasan pemerintahan desa	0	500	1,565,000,000	Seksi Tata Pemerintahan	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	0	6	75,000,000		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	0	6	75,000,000		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	0	6	75,000,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	0	12	125,000,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dilaksanakan	0	2			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							65,000,000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	6	75,000,000		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	18	225,000,000		
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	12	125,000,000		
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	6	75,000,000		
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	18	225,000,000		
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	12	125,000,000		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	12	125,000,000		
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemantauan dilaksanakan	0	144	175,000,000		
JUMLAH							44,541,420,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Selengkapnya target-target capaian kinerja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja 1

Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Sakip	CC	CC	B	B	B	A	A	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,69	86,69	87	87	88	90	91	91
3.	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	33,33 %	33,33 %	37 %	40 %	50 %	65 %	80 %	80 %
4.	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	29,41 %	41,67 %	41,18 %	52,94 %	70,59 %	88,24 %	100 %	100 %

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat empat (4) indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi selama 5 (lima) tahun ke depan. Resntra ini berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program kepala daerah. Pelaksanaan Renstra merupakan penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Bengkalis **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2020 yang dituangkankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Rensra ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Kecamatan Siak Kecil sebagai perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Kecamatan Siak Kecil sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak saja mementingkan aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Lubuk Muda, Juni 2021


CAMAT SIAK KECIL
M. FADLUL WAJDI, SSTP.M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 198209222001121001